LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 1

TAHUN : 2014

TENTANG : RPJMD KAB. TEMANGGUNG

TAHUN 2013-2018.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa sejak pemberlakuan otonomi daerah di tahun 1999. Otonomi daerah merupakan pintu gerbang bagi daerah untuk membangun daerah secara mandiri sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman dan menjaga sinergitas dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dalam rangka mewujudkan integrasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Dasawarsa pertama pemberlakuan otonomi daerah yaitu pada periode tahun 1999-2008, merupakan periode pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung terutama dalam hal menyelenggarakan pemerintahan daerah secara demokratis, bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang diperoleh pada periode dasawarsa pertama tersebut menjadi pijakan awal dalam menetapkan perencanaan pembangunan daerah pada dasawarsa kedua pemberlakuan otonomi daerah yaitu pada periode tahun 2009-2018 yaitu dengan disusunnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang maupun jangka menengah.

Pada dasawarsa kedua pemberlakuan otonomi daerah tersebut, bagi Kabupaten Temanggung hampir bersamaan dengan periode RPJMD yaitu pada 5 (lima) tahun pertama bersamaan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (yang berakhir di Tahun 2013) dan setengah dasawarsa berikutnya bersamaan dengan periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Salah satu hal yang penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah baik antara RPJPD dengan RPJMD maupun antar periode RPJMD agar dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara makro untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi dasar dan pedoman serta harus dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD.

Disamping itu, dengan selesainya pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013, maka segala hasil pembangunan baik yang sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan maupun yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 sebagai bagian yang perlu untuk dipertahankan, ditindaklanjuti, dan atau ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung untuk masa jabatan atau periode tahun 2013-2018 dilaksanakan pada tahun 2013 dan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut berhasil dilaksanakan dalam satu putaran yang menghasilkan pasangan Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO dan IRAWAN PRASETYADI, S.Si sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut selanjutnya dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2013-2018 pada Hari Senin, Tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-4691 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.33-4692 Tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 yang memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah, dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD tahun 2013-2018 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang mandiri, berdaya saing, berbudaya, dan makin sejahtera.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maka RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Temangung pada tahun 2013-2018. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah maka RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD tahun 2014-2018.

Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, maka RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif, partisipatif, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian maka substansi rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud adalah keterpaduan berbagai proses perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu:

1. Demokratis dan partisipatif; artinya dalam proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah;
2. Politis; artinya dalam proses penyusunan dan penetapan RPJMD dilaksanakan dalam kebersamaan dengan DPRD Kabupaten Temanggung untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
3. *Bottom Up planning;* artinya dalam proses penyusunan RPJMD memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat;
4. *Top Down planning;* artinya dalam proses penyusunan RPJMD senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah diatasnya.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun kegiatan penyusunan RPJMD tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD;

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

a). pembentukan Tim Penyusun RPJMD,

b). orientasi dan penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD, dan

c). penyiapan dan pengumpulan data dan informasi.

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;

Pada tahap ini, dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

a). pengolahan data dan informasi,

b). analisis gambaran umum kondisi daerah,

c). analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah,

d). evaluasi kinerja pembangunan daerah (evaluasi RPJMD 2008-2013 baik agregat maupun sektoral/urusan),

e). telaah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah,

f). perumusan masalah pembangunan daerah dan isu strategis daerah beserta kebijakan umum, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah untuk Tahun 2014-2018 berdasarkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2013-2018,

g). perumusan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah,

h). pelaksanaan curah pendapat,

i). penyelarasan prioritas program pembangunan daerah dengan kebijakan keuangan daerah, dan

j). penyajian rancangan awal RPJMD.

1. Penyusunan Rancangan RPJMD;

Tahap ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a). Sosialisasi rancangan awal RPJMD, dan

b). Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD.

1. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;

Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 juga melalui pembahasan intensif yang dilaksanakan dalam pelaksanaan *desk* perencanaan yaitu dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan rancangan awal Renstra SKPD untuk tahun 2013-2018 terutama pada saat menentukan dan menetapkan target kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 baik yang bersifat agregat maupun sektoral. Hasil pelaksanaan *desk* perencanaan tersebut selanjutnya disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RPJMD melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung mulai dari eksekutif, legislatif, organisasi profesi, perguruan tinggi, ormas, unsur pers dan lain-lain. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD selanjutnya menghasilkan rumusan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018*.*

1. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD;

Hasil kesepakatan yang dicapai pada pelaksanaan Musrenbang RPJMD digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk dibahas, dicermati bersama, dan mendapatkan persetujuan.

1. Penetapan RPJMD.

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

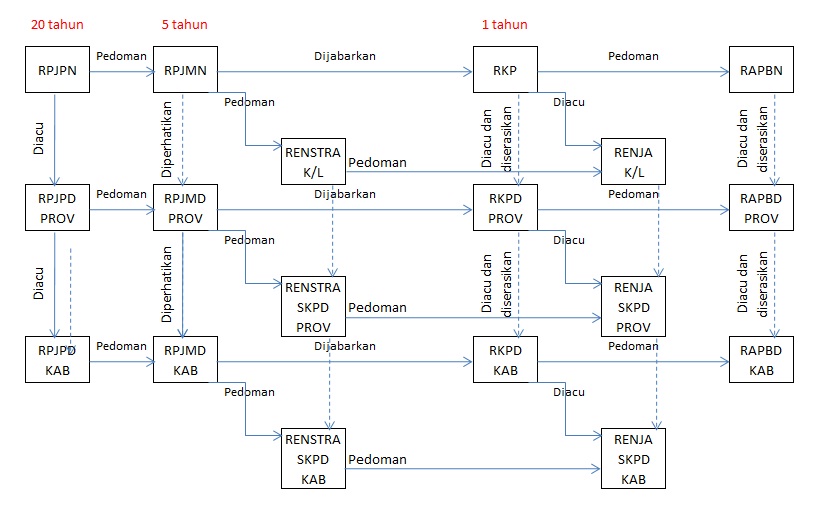
* 1. **Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1345);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5219);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 157);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6 );
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26)
    1. **Hubungan Antar Dokumen**

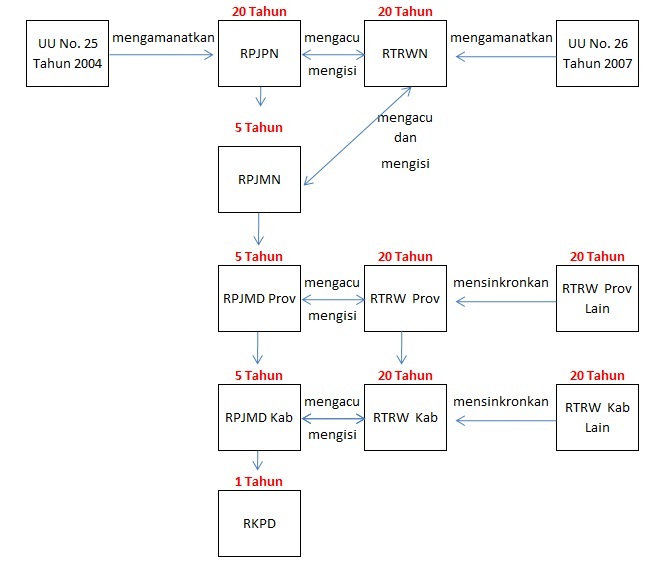
RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 mengacu pada RPJMN Tahun 2009-2014 dan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

****

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

****

Gambar 1.2

Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

* 1. **Maksud dan Tujuan**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument-instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai:

1. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perencanaan jangka pendek /tahunan yaitu RKPD dan Renja SKPD;
2. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
   1. **Sistematika Penulisan**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD yang meliputi pengertian secaran ringkas RPJMD, Proses penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.**

Memuat gambaran umum kondisi daerah, capaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah periode RPJMD Tahun 2008-2013.

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.**

Memuat tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah, meliputi : arah dan kebijakan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013, dan proyeksi keuangan daerah yang diikuti kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

**BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.**

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.**

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

**BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

Memuat tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah tahun 2013-2018. Program pembangunan daerah tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan SKPD dan dituangkan dalam Renstra SKPD.

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Memuat tentang program pembangunan daerah tahun 2013-2018 beserta rincian kerangka pendanaan untuk masing-masing program di masing-masing sasaran.

**BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.**

Memuat tentang indikator kinerja daerah beserta target per indikator untuk periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Indikator kinerja daerah diklasifikasikan dalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

**BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.**

Memuat tentang pedoman transisi antar periode RPJMD, yaitu masa transisi antara periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dengan periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2019.

**BAB XI PENUTUP.**

Memuat tentang prakata akhir Bupati.